



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS



PETA JALAN UKS SMA

TAHUN 2021 – 2024



Langkah demi langkah
menuju sekolah sehat berkeadilan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS



PETA JALAN UKS SMA

TAHUN 2021 – 2024



Langkah demi langkah
menuju sekolah sehat berkarakter

PETA JALAN UKS SMA

TAHUN 2021 – 2024

ISBN 978-602-5616-47-1 (PDF)

©2021 Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah

Dr. Suhartono Arham, M.Si.

Direktur Sekolah Menengah Atas

Penanggung Jawab

Dr. Juandanilisyah, SE, MA

Koordinator Bidang Peserta Didik

Penulis

Dr. Juandanilisyah, SE, MA

Dr. Fathnuryati Hidayah, SE, M.Pd.

Alex Firngadi, S. Sos., M.Si.

Dr. Nandang Hidayat, M.Pd.

Lufty Hari Susanto, M.Pd.

Doni Koesoema A., M.Ed.

MS Panca Waluyo, SE, MM

Kontributor

Dra. Titi Pratiwi Sariningsih, M.Pd

Mohammad Husain, M.Pd.

Aline Ardhiani, S.Sos., M.Kes

Yayu Mukaromah, S.Sos

Drs. Heri Fitriyono, MA

Annisa Rahmayanti, S. Stat.

A.B. Pramono, S.E., M.Si

Elsika Rahmawati, S.E., MAP

Murjijanto, S.Pd

Desain dan Tata Letak

Rizkiyana Daris

Kesekretarian

Amalia Adhi Saleh, S.T

Muhammad Fakhriansyah, S.E.

Ryan Armendaris

Fuad Yusril Wahab, S.E.

Mohammad Sidik Mulyana, A.Md.

Diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas
Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan
Telp: 021-75911532
www.pasma.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Peta Jalan UKS SMA Tahun 2021-2024. Penulisan Peta Jalan UKS ini ditujukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat berkarakter melalui program-program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang komprehensif, terintegrasi dengan keseluruhan program pendidikan, dan melibatkan semua stakeholders pada tiap jenjang Pendidikan khususnya SMA.

Peta Jalan UKS SMA Tahun 2021-2024 didasarkan pada analisis kondisi UKS SMA saat ini sebagai titik awal dan kondisi UKS SMA masa depan yaitu kondisi yang diharapkan pada tahun 2024 sebagai titik akhir yang ingin dicapai. Peta Jalan UKS SMA disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program UKS SMA agar terlaksana secara terpadu, terarah, intensif, dan berkesinambungan.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan peta jalan UKS ini. Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan peta jalan UKS masih banyak kekurangan, untuk itu kami sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun. Kami berharap peta jalan UKS dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan paradigma baru UKS.

Jakarta, November 2021

Direktur SMA



Dr. Suhartono Arham, M.Si.

NIP 196610181992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	2
2. Dasar Hukum	9
3. Tujuan Penyusunan Peta Jalan	11
B. KONDISI DAN PARADIGMA USAHA KESEHATAN SEKOLAH	13
1. Kondisi UKS SMA Saat Ini	14
2. Paradigma UKS – sebagai Subsystem Pendidikan	21
3. Target Capaian Kondisi UKS SMA pada Kurun Waktu 2021-2024	28
C. STRATEGI IMPLEMENTASI UKS SMA	31
1. Mengintegrasikan Nilai-nilai Karakter dalam UKS SMA	32
2. Menjadikan UKS sebagai Prioritas di SMA	32
3. Membangun Sinergi Sumberdaya	32
4. Advokasi UKS yang Komprehensif dan Berkelanjutan	33
5. Membangun Kapasitas SDM UKS SMA	33
6. Meningkatkan Intensitas Komunikasi melalui Komunitas UKS	34
7. Merancang <i>Platform</i> UKS SMA	35
8. Prioritas Pembinaan UKS SMA di Wilayah 3T	35
9. Prioritas Program Mitigasi Bencana untuk Sekolah di Wilayah Rawan Bencana Alam	35
D. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021-2024	37
1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) UKS	38
2. Bimbingan Teknis	38
3. Duta UKS SMA	38
4. UKS SMA <i>Expo Blended</i>	39
5. Bantuan Pemerintah	39
6. Apresiasi UKS SMA	39
7. Supervisi	39
8. Pemantauan dan Evaluasi	40
9. Dokumentasi Praktik Baik Pelaksanaan UKS	40
10. Pengembangan Aplikasi UKS	40
E. LAMPIRAN	41
Lampiran 1. Stratifikasi UKS untuk SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA/ MAK	42
Lampiran 2. Hasil Survei Stratifikasi UKS SMA Tahun 2021	46
F. DAFTAR PUSTAKA	50



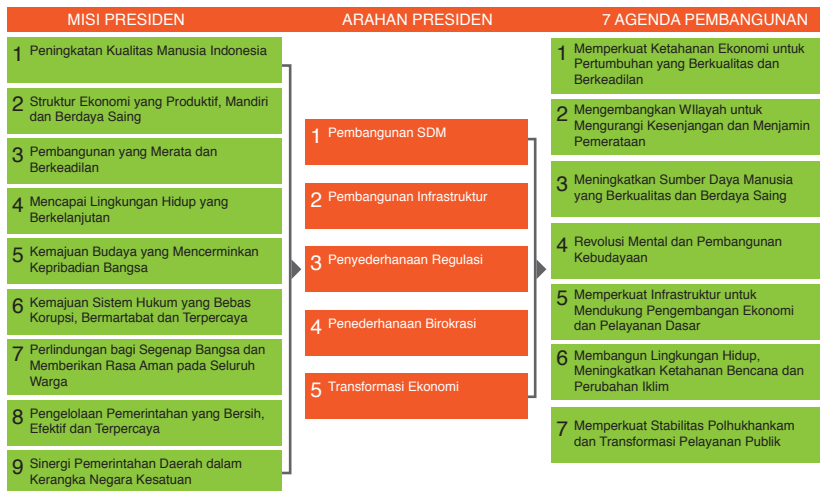
A. PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan, Indonesia tetap konsisten dengan cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan cita-cita melalui Visi Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi ini terdiri dari empat pilar pembangunan berdasarkan Pancasila, yaitu: (1) pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, (3) pemerataan pembangunan, dan (4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Visi tersebut dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan diluncurkan oleh Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo pada 9 Mei 2019.

Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mencakup 5 (lima) prioritas pembangunan dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagaimana disajikan dalam bentuk infografis pada gambar 1.



Gambar 1. Visi-Misi Presiden dan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama melalui pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;**
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi publik.

Pembangunan SDM merupakan tugas utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), yaitu **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui program prioritas:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;**
4. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan;
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Pembangunan sektor kesehatan masyarakat, yaitu **peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**, merupakan salah satu perhatian utama dalam pembangunan SDM pada RPJMN Tahun 2020-2024, guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, generasi

saat ini. Dalam hal ini, tugas Kemdikbudristek adalah mendukung pembangunan kesehatan masyarakat melalui pengembangan program-program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang komprehensif, terintegrasi dengan keseluruhan program pendidikan, dan melibatkan semua *stakeholders* pada tiap jenjang pendidikan.

Indonesia juga telah menyepakati Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* atau SDGs), yakni kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan ini berdasar kepada hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam sektor kesehatan, seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor 3, dengan rumusan “menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia”.

Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/ AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB). Terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM);

2. Penyalahgunaan narkotika dan alkohol;

3. Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas;

4. *Universal Health Coverage*;

5. Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah, serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Oleh karenanya tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi *input, process, output, outcome* dan *impact* pembangunan serta memahami bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era globalisasi saat ini.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), beberapa unit utama Kemendikbudristek merevisi beberapa kebijakan yang bersifat parsial menjadi satu program yang terintegrasi. Program Usaha Kesehatan Sekolah, Akhlak Mulia dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hasil revisi kebijakan yang bertujuan pembentukan karakter siswa menjadi satu kesatuan program. PPK merupakan suatu gerakan penanaman nilai-nilai karakter pada satuan pendidikan/ sekolah dalam rangka memperkuat karakter siswa agar menjadi Pelajar Pancasila melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan adanya koordinasi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat sehingga tercipta Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dengan memiliki karakter yang kuat dan berjiwa Pelajar Pancasila, diharapkan peserta didik memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah yang sehat. Sekolah Sehat Berkarakter adalah sekolah yang membangun peserta didik sebagai insan sehat dan mengembangkan potensi psikososialnya yang mencerminkan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Kegiatan UKS terkait erat dengan pengembangan pendidikan karakter di satuan pendidikan. UKS harus dipahami dalam kaitannya dengan pembentukan manusia pancasilais seperti tercermin dalam Profil “**Pelajar Pancasila**”. Dimensi nilai dalam pengembangan UKS merupakan bagian penting dalam dimensi profil “**Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia**”. Manusia pada dimensi ini memiliki ciri menghargai tubuh sebagai anugerah Tuhan, mengembangkan dimensi fisik sebagai bagian dalam mengembangkan kehidupan rohani, dan spiritual yang memungkinkan individu menjalankan tanggung jawab

moralnya, yaitu menjaga, menghargai, dan melakukan kebaikan, bagi diri sendiri dan orang lain.

Penghargaan terhadap tubuh adalah cara bagaimana manusia menghargai keberadaan manusia lain apapun keadaan fisik dan kondisinya (*difable*), mental dan psikologis yang dimilikinya. Penghargaan terhadap tubuh tidak sama dengan kultus terhadap tubuh, yaitu sebuah pandangan bahwa mereka yang sehat saja yang boleh berkiprah. Pandangan ini sangat keliru. Kondisi seseorang, *difable* maupun non *difable* memiliki kontribusi penting bagi pembangunan bangsa. Dalam konteks pendidikan karakter, semua individu memiliki tugas dan kewajiban yang khas dalam membangun tatanan kehidupan bersama. Kekurangan fisik apapun yang dimiliki manusia, tidak pernah dapat menghilangkan dimensi kemanusiaannya. Karena itu, apapun kondisi seseorang, mereka ini adalah tetap manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kemartabatan dan keluhuran. Dalam perspektif inilah, UKS menjadi bagian tak terpisahkan dalam pendidikan karakter.

Amanat Peraturan Bersama 4 Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M), pasal 4 dan 5 mengamanatkan bahwa kegiatan pokok UKS yaitu penanaman dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar. UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik. Sasaran UKS adalah seluruh warga sekolah yang mencakup: peserta didik, Kepala Sekolah, pendidik/ guru, tenaga kependidikan, unsur Puskesmas dan unsur Tim Pelaksana UKS, lingkungan keluarga, serta lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Mengacu pada amanat yang tertuang dalam peraturan bersama tersebut, maka program-program UKS harus diarahkan pada upaya penanaman dan pembudayaan PHBS di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hidup sehat yang dimaksud sebagaimana didefinisikan oleh badan kesehatan *World Health Organization (WHO)* adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Dalam peraturan bersama tersebut dinyatakan bahwa membina, mengembangkan, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada peserta didik dilaksanakan secara terencana dan bertanggung jawab melalui program pendidikan yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan melalui usaha-usaha lain di luar sekolah yang menunjang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269/Menkes/PER/XI/2011 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menyatakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Penerapan kebermanfaatannya PHBS di sekolah dilaksanakan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang merupakan salah satu upaya untuk membina dan mengembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat melalui jalur pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Untuk mewujudkan ketercapaian di atas, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan peran dan fungsi UKS. Program UKS di sekolah dikelompokkan dalam 3 bidang yang selanjutnya disebut **Trias UKS** yaitu pendidikan kesehatan, usaha pemeliharaan kesehatan di ubah menjadi pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pendidikan Kesehatan mencakup peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan hidup bersih, serta pembudayaan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Pelayanan Kesehatan mencakup antara lain imunisasi, *screening* kesehatan, pemeriksaan dan perawatan gigi serta mulut, PHBS, tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pemberian tablet tambah darah, kecacingan, tanaman obat keluarga, kantin sehat, keamanan makanan jajanan anak sekolah dan gizi, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan pertolongan pertama pada penyakit (P3P), pemulihan pasca sakit, dan rujukan ke Puskesmas/Rumah Sakit.

Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat mencakup pelaksanaan 7K (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban, Keamanan, Kerindangan,

dan Kekeluargaan). Pemeliharaan lingkungan sehat yaitu bebas dari narkoba, psikotropika, asap rokok, pornografi dan pornoaksi, kekerasan dan perundungan (*bullying*) pada anak, dan sebagainya.

Manajemen UKS dalam pelaksanaan Trias UKS, perlu dipersiapkan dengan baik berkaitan perencanaan, ketenagaan, pendanaan, sarana prasarana, penelitian dan pengembangan, manajemen, komitmen, serta koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, baik lembaga pemerintah, swasta maupun organisasi nasional dan internasional terkait.

Kesehatan peserta didik sangat menentukan keberhasilan belajarnya di sekolah, karena dengan kesehatan itu, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara optimal untuk mencapai prestasi terbaik sesuai bakat dan potensinya. Kehadiran UKS dengan program-program yang terintegrasi sesuai dengan konsep Trias UKS, diharapkan mampu menginternalisasi sikap dan nilai-nilai hidup bersih dan sehat yang diwujudkan dalam kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat pada dirinya sendiri dan berkontribusi terhadap kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Program peningkatan PHBS bagi peserta didik perlu dilakukan sedini mungkin secara terpadu, terencana, terarah dan terkoordinasi sesuai amanat dari peraturan bersama 4 (empat) Kementerian terkait mulai dari tingkat pusat sampai daerah serta melibatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pembinaan dan pengembangan UKS, akan terlihat dan tercermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatnya derajat kesehatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah, serta orang tua/keluarga peserta didik. Kondisi tersebut merupakan dampak (*outcomes*) yang diharapkan dari terlaksananya pembinaan dan pengembangan program UKS. Dampak dari keberhasilan pembinaan dan pengembangan UKS dapat diukur dari sikap dan perilaku peserta didik dan seluruh warga sekolah melalui indikator berikut:

1. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan;
2. Peningkatan hidup bersih dan sehat baik dalam bentuk fisik, nonfisik, mental maupun sosial;

3. Peningkatkan prestasi belajar peserta didik secara optimal sesuai bakat dan potensinya;
4. Peningkatan derajat kesehatan peserta didik dapat bertumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal;
5. Terwujudnya sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kawasan Tanpa Napza (KTN), Kawasan Tanpa Kekerasan (KTK), Kawasan Tanpa Pornografi (KTP).

Untuk mencapai keberhasilan dari pembinaan dan pengembangan UKS sehingga memberi dampak sesuai indikator di atas, diperlukan perencanaan yang baik dan didukung oleh SDM atau ketenagaan, pendanaan, sarana prasarana, manajemen, komitmen, dan koordinasi serta kerjasama yang baik antara semua pihak terkait. Semua program pengembangan dan pembinaan UKS harus dirancang dan diarahkan pada upaya pencapaian dampak tersebut di atas. Program pembinaan Tim Pembina UKS di tingkat daerah dan Tim Pelaksana UKS di tingkat sekolah harus dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga pembinaan dan pengembangan UKS didukung oleh ketersediaan SDM yang mumpuni. Selain itu, semua program yang dirancang harus didukung oleh dasar pemikiran yang jelas, berbasis pada data lapangan, rumusan tujuannya spesifik, dan indikator keberhasilan yang terukur dan mendukung pencapaian indikator dampak program UKS sebagaimana disajikan di atas.

Agar pembinaan dan pengembangan UKS dapat dirancang dan dilaksanakan secara terarah dengan baik, maka diperlukan Peta Jalan UKS yang memuat pentahapan capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pembinaan dan pengembangan UKS. Untuk itu, Peta Jalan UKS SMA Tahun 2021-2024 ini disusun. Penyusunan Peta Jalan UKS SMA Tahun 2021-2024 didasarkan pada analisis kondisi UKS SMA saat ini sebagai titik awal dan kondisi UKS SMA masa depan yaitu kondisi pada tahun 2024 sebagai titik akhir yang ingin dicapai.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Sekolah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- l. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- m. Peraturan Presiden Nomor 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- n. Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
- o. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA);
- r. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kesehatan Anak;

- t. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

3. Tujuan Penyusunan Peta Jalan

Peta Jalan UKS SMA disusun dengan tujuan untuk memberi acuan dalam pelaksanaan program UKS SMA agar terlaksana secara terpadu, terarah, intensif, dan berkesinambungan.



Ki Hajar Dewantara 1889-1959

Usaha pendidikan ditujukan kepada:
halusnya budi, cerdasnya otak,
dan **sehatnya badan.**

Ketiga usaha itu akan menjadikan lengkap dan
larasnya hidup manusia di dunia.

“Wasita” Jilid 1 No. 1 - Oktober 1928



**B. KONDISI DAN
PARADIGMA
USAHA KESEHATAN
SEKOLAH**

B. KONDISI DAN PARADIGMA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1. Kondisi UKS SMA Saat Ini

Selama ini UKS dipahami sekedar sebagai pendukung pendidikan di sekolah, yang fokusnya hanya terbatas pada pemenuhan sarana dan prasarana saja dan hanya merupakan bagian dari program ekstrakurikuler sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. UKS selama ini masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya perilaku hidup bersih dan sehat belum mencapai tingkat yang diharapkan, terbatasnya sarana dan prasarana sekolah, belum tersedianya *database* yang terintegrasi, dan koordinasi antarinstansi terkait menangani UKS belum optimal.

Peta Kepemilikan Ruang UKS SMA Tiap Provinsi

Provinsi	Jumlah SMA	Ruang UKS	% Kepemilikan	Provinsi	Jumlah SMA	Ruang UKS	% Kepemilikan
Aceh	533	193	36%	Kep. Riau	157	73	46%
Bali	158	115	73%	Lampung	510	283	55%
Banten	588	300	51%	Maluku	283	72	25%
Bengkulu	143	80	56%	Maluku Utara	217	20	9%
D.I. Yogyakarta	168	153	91%	Nusa Tenggara Barat	335	122	36%
D.K.I. Jakarta	492	411	84%	Nusa Tenggara Timur	576	173	30%
Gorontalo	69	28	41%	Papua	246	61	25%
Jambi	235	133	57%	Papua Barat	129	31	24%
Jawa Barat	1680	983	59%	Riau	456	226	50%
Jawa Tengah	858	681	79%	Sulawesi Barat	88	25	28%
Jawa Timur	1521	966	64%	Sulawesi Selatan	600	275	46%
Kalimantan Barat	449	227	51%	Sulawesi Tengah	228	65	29%
Kalimantan Selatan	203	119	59%	Sulawesi Tenggara	309	93	30%
Kalimantan Tengah	241	118	49%	Sulawesi Utara	229	108	47%
Kalimantan Timur	229	136	59%	Sumatera Barat	331	215	65%
Kalimantan Utara	66	24	36%	Sumatera Selatan	605	350	58%
Kep. Bangka Belitung	70	45	64%	Sumatera Utara	1080	489	45%

Tabel 1. Peta Kepemilikan Ruang UKS SMA Tiap Provinsi

Sumber: Direktorat SMA, Kondisi 2020

Data kepemilikan ruang UKS pada SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia yang dirilis oleh Direktorat SMA pada kondisi April 2021 disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan data tersebut diperoleh gambaran bahwa belum semua SMA di seluruh

Indonesia memiliki ruang UKS. Dari 13.879 SMA yang ada, terdapat 7.193 SMA (52%) yang sudah memiliki ruang UKS. Seyogyanya pemenuhan sarana prasarana pendukung UKS menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Namun faktanya 48% SMA belum memiliki ruang UKS. Hal ini menunjukkan rendahnya dukungan dan partisipasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat terhadap program UKS. Meskipun kepemilikan ruang UKS bukan indikator bahwa SMA yang belum memiliki ruang UKS tidak melaksanakan program UKS, namun dapat dipastikan Trias UKS di SMA tersebut tidak akan berjalan secara baik dan seimbang.

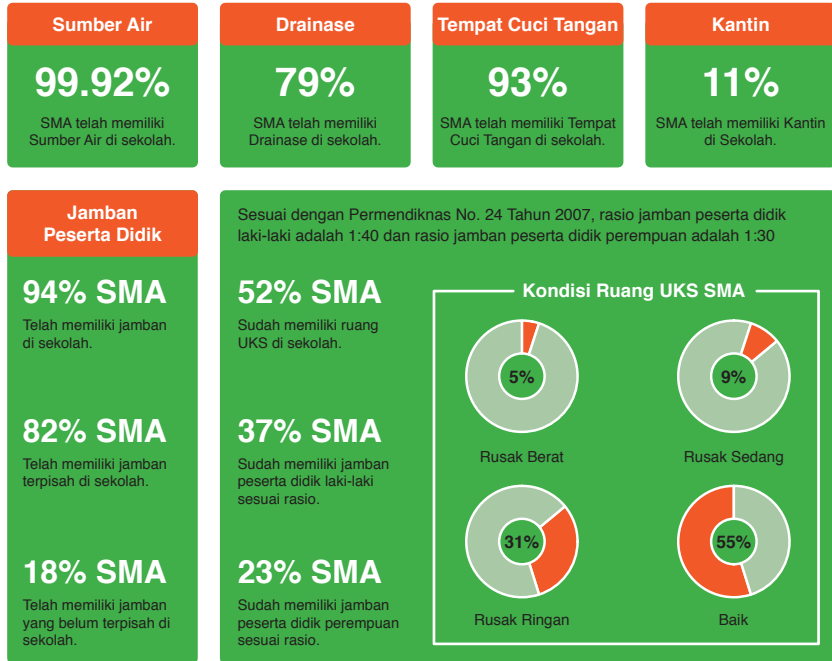
Berdasarkan peta kepemilikan ruang UKS SMA tiap provinsi sebagaimana disajikan pada Tabel 1, nampak bahwa DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kepemilikan ruang UKS tertinggi, yaitu sebanyak 146 SMA telah memiliki ruang UKS dari 168 SMA yang ada di DI Yogyakarta (87%). Sementara itu, provinsi dengan tingkat kepemilikan ruang UKS terendah adalah provinsi Maluku Utara, 24 SMA yang telah memiliki ruang UKS dari 212 SMA yang ada di provinsi Maluku Utara (11%). Persentase kepemilikan ruang UKS SMA di provinsi lainya berkisar diantara 11% - 87%. Fakta ini mengindikasikan bahwa program Trias UKS belum berjalan dengan baik dan seimbang pada semua SMA di tiap provinsi.

Kondisi prasarana ruang UKS di SMA yang telah memiliki ruang UKS disajikan dalam bentuk infografis seperti tampak pada Gambar 1. Berdasarkan data pada Gambar 1 tersebut, nampak bahwa dari 7193 (52%) SMA yang telah memiliki prasarana ruang UKS menunjukkan 55% dalam kondisi baik, 5% rusak berat, 9% rusak sedang, dan 31% rusak ringan. Fakta ini memberi gambaran bahwa ruang UKS sebagai sarana pendukung utama terselenggaranya program Trias UKS kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, perlu dirancang program perbaikan prasarana ruang UKS SMA yang sudah ada, sehingga semua ruang UKS SMA tersebut kondisinya baik.

Kondisi infrastruktur sarana pendukung kesehatan di SMA yang mencakup sumber air, drainase, tempat cuci tangan, kantin, dan jamban disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan data dalam bentuk infografis yang disajikan pada Gambar 1, ada sejumlah infrastruktur sarana pendukung kesehatan di SMA yang masih perlu mendapat perhatian serius. SMA yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur drainase ada 79%, artinya masih terdapat 21% SMA yang belum dilengkapi dengan infrastruktur drainase yang memadai. Hal ini tentu saja sangat riskan, karena

sekolah yang tidak dilengkapi dengan drainase yang baik, sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir atau longsor pada saat musim penghujan. Apabila bencana tersebut terjadi sudah barang tentu akan mengganggu kesehatan fisik dan mental peserta didik dan seluruh warga sekolah, serta akan mengganggu penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan di SMA tersebut.

Kondisi Sarana Pendukung Kesehatan di SMA



Gambar 1. Kondisi Sarana Pendukung Kesehatan di SMA
Sumber: Direktorat SMA, Kondisi April 2021

SMA yang sudah dilengkapi dengan sarana tempat cuci tangan untuk peserta didik ada 93%, artinya masih terdapat 7% SMA yang belum memiliki sarana tempat cuci tangan untuk peserta didik. Meskipun dilihat dari persentasenya relatif kecil, namun jika dilihat jumlahnya tentu cukup banyak, yaitu sebanyak 971 SMA dari 13.869 SMA yang ada di seluruh Indonesia. Tidak adanya sarana tempat cuci tangan peserta didik akan sangat berpengaruh pada upaya menjaga kesehatan peserta didik melalui pembiasaan mencuci tangan, yang merupakan salah satu program UKS SMA. Selain itu, kondisi kesehatan peserta didik dan semua warga sekolah

tentu saja akan sangat terganggu dengan tidak adanya sarana tempat cuci tangan peserta didik, terlebih pada saat terjadinya pandemik seperti sedang terjadi saat ini, yaitu pandemik Covid-19.

Sarana pendukung kesehatan lain adalah kantin sekolah. Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa saat ini hanya terdapat 11% SMA yang sudah memiliki sarana kantin di dalam sekolah. Artinya, terdapat 89% SMA di seluruh Indonesia yang belum dilengkapi sarana kantin di dalam sekolah. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena keberadaan kantin di dalam sekolah akan sangat berpengaruh pada kesehatan peserta didik dan warga sekolah lainnya. Tidak semua peserta didik membawa bekal makanan saat bersekolah, bahkan sebagian besar peserta didik tidak membawa bekal makanan. Bagi mereka yang tidak membawa bekal makanan, tentu saja harus membeli atau jajan dari kantin yang ada di sekolah saat mereka membutuhkan makanan. Jika sekolah tidak menyediakan kantin sehat di sekolah tentu saja akan memaksa peserta didik untuk membeli makanan dari para penjaja makanan yang ada di sekitar sekolah. Hal ini tentu sangat beresiko terhadap kesehatan mereka, karena makanan yang disediakan oleh penjaja makanan tersebut tidak dijamin memenuhi syarat sebagai makanan sehat dan menyehatkan.

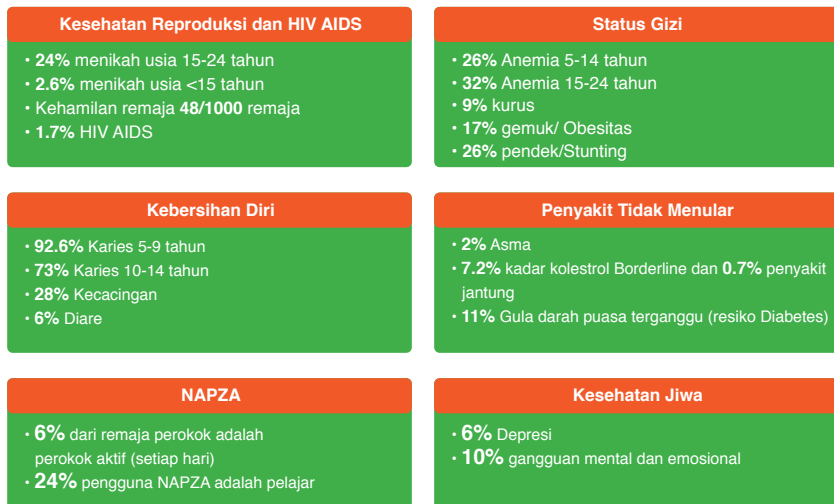
Data infografis yang disajikan pada Gambar 1 juga menunjukkan bahwa ada sebanyak 94% SMA yang sudah menyediakan sarana jamban di sekolah, artinya masih terdapat 6% SMA yang belum memiliki sarana jamban di sekolah. Dari 94% SMA yang telah dilengkapi jamban sekolah, sebanyak 82% yang sarana jambannya telah terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Dari 82% SMA dengan jamban terpisah tersebut, hanya 37% SMA yang kondisi jamban laki-lakinya dan 23% SMA yang kondisi jamban perempuannya memenuhi standar. Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 tahun 2017, standar rasio jamban untuk laki-laki adalah 1:40, sedangkan untuk perempuan adalah 1:30.

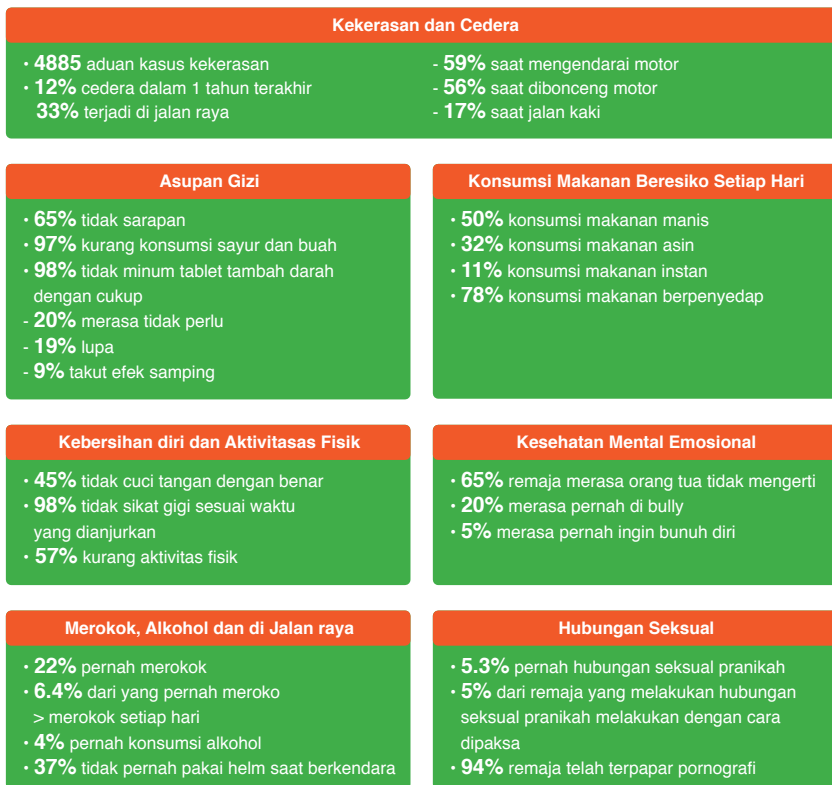
Berkaitan dengan stratifikasi UKS SMA, sampai saat ini belum ada data empirik pengelompokkan UKS SMA ke dalam stratifikasi minimal, standar, optimal, dan paripurna sesuai persyaratan sebagaimana disajikan pada lampiran 1. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta empiris sebagaimana diuraikan di atas mengindikasikan bahwa dilihat dari indikator **“Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat”** berupa ketersediaan ruang UKS serta infrastruktur

sarana dan parsarana pendukung kesehatan SMA, stratifikasi UKS SMA secara umum masih dapat dikategorikan **standar** bahkan masih cukup banyak yang dapat dikategorikan **minimal**.

Fakta berkaitan dengan asupan gizi, kondisi kesehatan, dan perilaku menyimpang disajikan dalam infografis pada Gambar 2. Berkaitan dengan status gizi, kebersihan diri, dan penyakit tidak menular sebagaimana disajikan pada infografis tersebut, salah satunya disebabkan asupan gizi yang tidak baik pada saat mereka mengonsumsi makanan di kantin di luar sekolah. Selain itu, jajan makanan di luar sekolah memberi peluang terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan peserta didik, seperti merokok, minum alkohol, mengonsumsi narkoba, sex bebas, dan perilaku menyimpang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena mereka melakukan aktivitas tersebut di luar lingkungan sekolah. Semua perilaku menyimpang yang disajikan pada Gambar 2, sebagian dilakukan oleh anak usia SMA. Perilaku-perilaku menyimpang tersebut sudah dipastikan mereka lakukan di luar kontrol sekolah, yang salah satu kemungkinannya dilakukan saat mereka jajan di kantin di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kondisi terkait dengan keberadaan kantin sehat di dalam sekolah yang umumnya tidak dimiliki oleh SMA merupakan tugas besar yang harus segera diatasi.

Kondisi Kesehatan Anak Usia Remaja



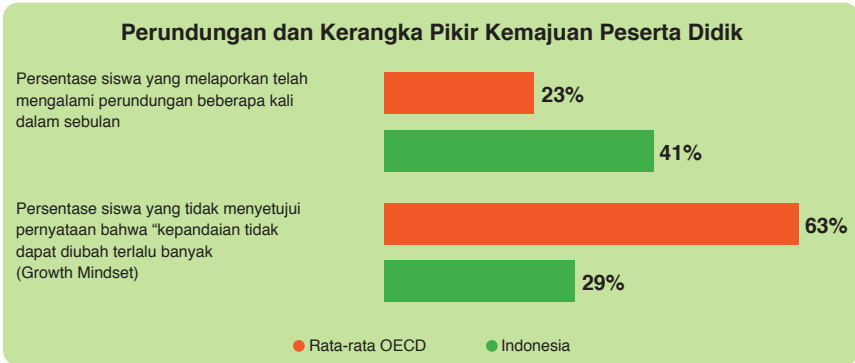


Gambar 2. Kondisi Kesehatan Anak Usia Remaja
 Sumber: Riskesda 2018, BKKBN 2016, Dit. P2PTVZ, KPAI 2018, SIHA 2018, dan BNN 2017

Dalam hal perundungan (*bullying*) dan kerangka pikir kemajuan (*growth mindset*), hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagaimana disajikan pada Gambar 3 menunjukkan hal yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan grafik pada Gambar 3, nampak bahwa 41% peserta didik Indonesia melaporkan bahwa dirinya mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23%. Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai

membaca 21 (dua puluh satu) poin lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mengalami perundungan. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah. Selain itu, grafik di atas juga menunjukkan bahwa hanya 29% peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa “kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak”, jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63%. Ini bermakna peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan yang tinggi memiliki nilai membaca 32 (tiga puluh dua) poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan itu penting.

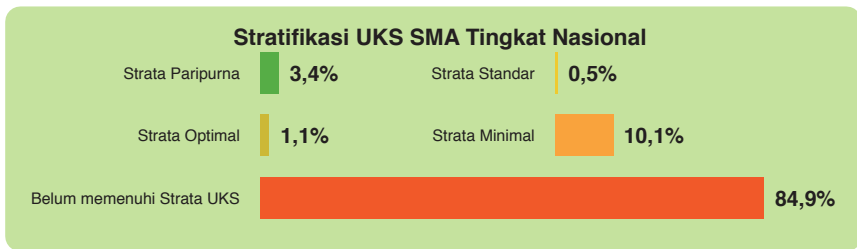


Gambar 3. Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik
Sumber: OECD, 2019

Fakta berkaitan dengan *bullying* yang dialami dan *growth mindset* peserta didik di Indonesia sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan kondisi yang dapat dikategorikan sangat mengkhawatirkan. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka sudah bisa dipastikan banyak peserta didik kita yang akan gagal meraih prestasi optimal sesuai bakat dan potensinya. Untuk itu, perlu dirancang program UKS SMA yang inovatif secara gradual dapat menurunkan persentase peserta didik yang mengalami *bullying* dan meningkatkan *growth mindset* peserta didik.

Hasil survey nasional mengenai stratifikasi UKS SMA disajikan pada Gambar 4. Gambaran tingkat strata SMA secara nasional, di kategorikan menjadi strata minimal, standar, optimal dan paripurna. Berdasarkan data yang didapat dari 3302 sekolah

(26%). terdapat 10,1% sekolah yang memenuhi strata minimal, 0,6% memenuhi strata standar, 1,1% memenuhi strata optimal dan 3,4% memenuhi strata paripurna secara lengkap di setiap komponen (Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS). Sedangkan 84,9% sekolah belum memenuhi indikator-indikator UKS secara lengkap. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan sekolah untuk memenuhi indikator di setiap komponen berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan bagi sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah untuk dapat memenuhi indikator stratifikasi UKS secara paripurna.



Gambar 4. Stratifikasi UKS SMA Tingkat Nasional

2. Paradigma UKS – Sebagai Subsistem Pendidikan

Selama ini, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) kurang dipahami kepentingannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional karena pola pikir dan cara pandang yang tidak utuh. UKS hanya dipahami sekedar sebagai kegiatan dan program, bahkan dalam artian tertentu, direduksi sekedar sebagai keberadaan ruang UKS, atau sekedar kegiatan ekstrakurikuler yang disejajarkan dengan kegiatan sekolah lain, seperti ekstrakurikuler olah raga atau seni. Padahal, apa yang diupayakan dalam UKS adalah sebuah penyiapan kondisi warga sekolah yang kondusif bagi pembelajaran berupa lingkungan fisik, sosial, dan psikologis di sekolah yang mendukung keberhasilan belajar. Karena itu, perlu dikembangkan paradigma baru UKS sebagai sebuah bagian fundamental kebijakan pendidikan yang mendasari berjalannya seluruh proses pendidikan. UKS perlu dipahami sebagai subsistem kebijakan pendidikan nasional, yang menjadikan UKS sebagai sebuah prakondisi atau prasyarat berhasilnya sebuah proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, memahami UKS sebagai bagian dalam proses pembelajaran, termasuk di dalamnya kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler dalam pembelajaran dan kegiatan kokurikuler yang mendukung pembelajaran di kelas. Ini semua dilakukan di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Implementasi UKS tidak hanya dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. UKS semestinya sudah terintegrasi dengan seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler. Trias UKS semestinya dilaksanakan melalui pendidikan kesehatan, usaha pemeliharaan kesehatan sekolah, dan menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Bahkan, amanat Peraturan Bersama 4 Kementerian, Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), pasal 4 dan 5 menegaskan bahwa kegiatan UKS adalah penanaman dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar. Ini berarti, UKS menjadi sarana pembentuk mental dan budaya dalam diri peserta didik agar memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk lingkungan di luar dirinya. UKS perlu dipandang sebagai bagian integral dalam kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mencakup tentang hidup bersih, menjaga lingkungan dan kesehatan yang bermuara pada terbentuknya Pelajar Pancasila.

Program prioritas Kemendikbudristek saat ini dan ke depan dalam pendidikan karakter adalah untuk mengantisipasi dan mengatasi empat (4) dosa besar pendidikan yang berkembang secara masif, yaitu intoleransi yang menimbulkan radikalisme, kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), dan penyalahgunaan NAPZA. Untuk itu perlu dilakukan berbagai inisiatif, aktivitas dan upaya terkait dengan upaya penguatan nilai-nilai nasionalisme, gotong royong dan integritas. Keberhasilan mengatasi keempat isu-isu prioritas tersebut sekaligus memperkuat perwujudan nilai-nilai bermasyarakat dan bernegara yang merujuk kepada nilai-nilai Pancasila, terutama dalam rangka terbentuknya profil pelajar Pancasila yang dicirikan dengan berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, gotong-royong, berkebhinnekaan global, dan mandiri.

Paradigma baru UKS sebagai subsistem pendidikan memiliki konsekuensi bahwa UKS ke depan tidak lagi hanya melakukan kegiatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan di sekolah, tetapi UKS juga memberikan pendidikan kesehatan yang terintegrasi dalam setiap kegiatan sehari-hari warga sekolah. Pendidikan Kesehatan bagi para remaja khususnya SMA pada saat era digital ini sangat penting, mengingat usia-usia SMA sangat rentan terhadap pengaruh narkoba. NAPZA telah merusak kehidupan belajar dan memutus hubungan pelajar/mahasiswa dengan sekitarnya. Data berikut menunjukkan hal tersebut.

Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

Dampak di Lingkungan Sekolah

Mengganggu Hubungan Guru/Dosen
53,2%

Mengganggu Hubungan dengan Teman Dekat
39,9%

Dikeluarkan dari sekolah
22,1%

Mengganggu Hubungan dengan Guru/Dosen
33,6%

Suka Bolos atau Malas Sekolah
56%

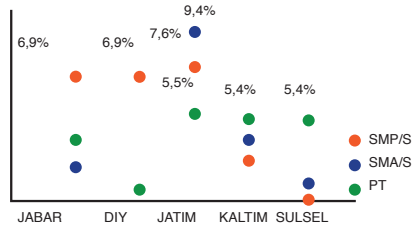
Sikap terhadap penyalahgunaan narkoba

Sikap 3 dari 1.000 pelajar atau mahasiswa

MENERIMA apabila :

- Ditawari untuk membeli narkoba
- Ditawari narkoba secara gratis
- Diminta untuk memberikan narkoba kepada orang lain
- Diminta untuk menjual narkoba kepada orang lain

Data penelitian tahun 2018



- Prov.Jatim Angka Prevelensi tertinggi di semua tingkat pendidikan
- Prov.Jabar dan DIY angka prevalensi tertinggi di pelajar SMP
- Prov.DKI angka prevalensi tertinggi di pelajar SMA
- Prov.Kaltim dan Sulsel, Angka prevalensi tertinggi di PT

Gambar 5. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia menurut hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2019), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sebesar 1,80% atau ±3.419.188 orang, atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia usia 15-69 tahun terparap Narkoba dalam setahun terakhir.

Salah satu strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi fakta tersebut, program kebijakan sekolah sehat berkarakter perlu diimplementasi pada setiap jenjang

pendidikan, terutama pada SMA, mengingat usia SMA merupakan usia yang paling rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. UKS-lah yang dapat melaksanakan tugas pendidikan kesehatan dalam kegiatan sekolah sehari-hari.

Jadi, UKS ke depan diharapkan dapat menjadi bagian dari subsistem pendidikan pada tingkat sekolah yang memberi kontribusi terhadap keberhasilan implementasi “Merdeka Belajar” di SMA. Implementasi filosofi “Merdeka Belajar” di semua jenjang dan satuan Pendidikan merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam upaya mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia Tahun 2035, yaitu “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”.

Indikator tercapainya visi tersebut adalah terwujudnya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan UKS SMA, terwujudnya pendidikan berkualitas pada jenjang SMA salah satunya ditandai oleh meningkatnya kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberhasilan pelaksanaan program-program Trias UKS di SMA. Semua pihak yang berkepentingan termasuk peserta didik menunjukkan keterlibatan aktif untuk berkontribusi dan menjadi agen-agen perubahan (*change agents*) serta memberi pengaruh dan dukungan penuh terhadap upaya yang sedang dan akan terus dilakukan dalam menyukseskan program Trias UKS di SMA. Dengan demikian, Trias UKS menjadi salah satu komponen dalam subsistem pendidikan pada tingkat sekolah yang mendukung implementasi filosofi “Merdeka Belajar” di SMA.

Selain itu, UKS SMA masa depan yang diharapkan adalah UKS yang dengan program-program Trias UKS-nya yang terintegrasi dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan di SMA dapat berkontribusi terhadap internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya melahirkan “Pelajar Pancasila” yang menjadi salah satu kebijakan Kemdikbud. Konsep “Pelajar Pancasila” dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif harus menjadi ruh dari keseluruhan program Trias UKS di SMA. Penjabaran keenam ciri utama “Pelajar Pancasila” secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

b. Berkebhinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebhinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan.

c. Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

d. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

e. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

f. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Pengembangan Model UKS SMA kedepan diharapkan menjadi ujung tombak dari semua kebijakan dan program Sekolah Sehat, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Aman dan Sekolah Adiwiyata. Sekolah Sehat Berkarakter ini merupakan kebijakan Kemendikbudristek agar seluruh warga sekolah yang terdiri dari siswa, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan komite sekolah, memiliki perilaku hidup sehat dan berkarakter. Keberadaan sekolah sehat berkarakter ini akan semakin kokoh apabila peranan UKS lebih diperbesar dan tidak hanya dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

UKS yang akan dikembangkan harus sejalan dengan filosofi “Merdeka Belajar” dan “Pelajar Pancasila” dan harus terintegrasi ke dalam 4 (empat) konsep, yaitu: 1) Sekolah Sehat, 2) Sekolah Ramah Anak, 3) Sekolah Adiwiyata, dan 4) Sekolah Aman sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 6.

Konsep UKS SMA Masa Depan

UKS SMA

1. Sekolah Sehat

Sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman, dan nyaman, peserta didiknya sehat, aktif dan bugar, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. Sekolah Ramah Anak

Sekolah yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

3. Sekolah Adiwiyata

Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

4. Sekolah Aman Bencana

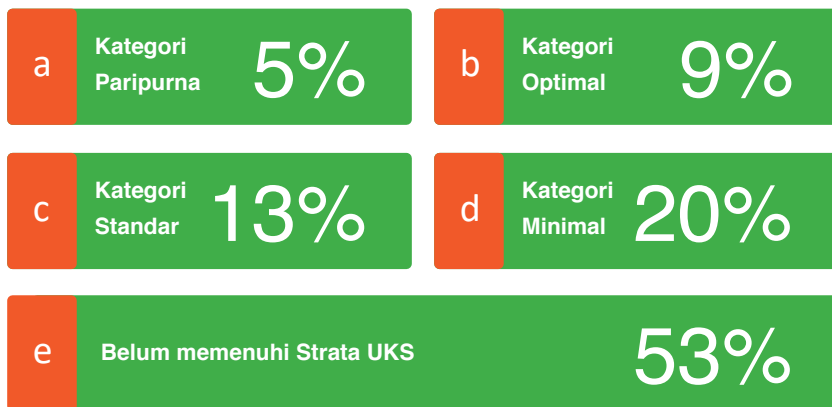
Sekolah yang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana.

Gambar 6. Konsep UKS SMA Masa Depan

Untuk mewujudkan program-program Trias UKS berkontribusi terhadap implementasi filosofi “Merdeka Belajar” dan “Pelajar Pancasila”, maka UKS SMA harus berbenah diri dengan menyediakan ruang UKS dengan segala perlengkapannya, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan sekolah, dan meningkatkan kapasitas SDM pelaksana UKS.

UKS SMA yang diharapkan masa mendatang adalah UKS yang memenuhi Persentase UKS SMA yang memenuhi stratifikasi:

Target stratifikasi UKS 2024



Gambar 7. Target stratifikasi UKS 2024

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, UKS merupakan bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Padahal, sesungguhnya implementasi UKS tidak hanya dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. UKS sudah terintegrasi dengan seluruh kegiatan pelajaran di sekolah, baik intrakurikuler maupun kokurikuler. Trias UKS dilaksanakan melalui pendidikan kesehatan, usaha pemeliharaan kesehatan sekolah, dan menciptakan

lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Selain itu, amanat Peraturan Bersama 4 Kementerian, Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), pasal 4 dan 5 bahwa kegiatan UKS adalah penanaman dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar.

UKS juga diharapkan menjadi salah satu wadah penerapan dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mencakup tentang hidup bersih, menjaga lingkungan dan kesehatan yang bermuara pada terbentuknya Profil Pancasila. Program prioritas Kemendikbudristek saat ini dan kedepan dalam pendidikan karakter adalah untuk mengantisipasi dan mengatasi empat (4) dosa besar pendidikan yang berkembang secara masif, yaitu intoleransi yang menimbulkan radikalisme, kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu maka dilakukan berbagai inisiatif, aktivitas dan upaya terkait dengan upaya penguatan nilai-nilai nasionalisme, gotong royong dan integritas. Keberhasilan mengatasi ketiga isu isu prioritas tersebut sekaligus memperkuat perwujudan nilai-nilai bermasyarakat dan bernegara yang merujuk kepada nilai-nilai Pancasila, terutama dalam rangka terbentuknya profil pemelajar Pancasila yang dicirikan dengan berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, gotong-royong, berkebhinnekaan global, dan mandiri.

UKS kedepan tidak lagi hanya menjalankan pelayanan kesehatan di sekolah, tetapi UKS juga memberikan pendidikan kesehatan yang terintegrasi dalam setiap kegiatan sehari-hari warga sekolah. Pendidikan Kesehatan bagi para remaja khususnya SMA pada saat era digital ini sangat penting, mengingat usia-usia SMA sangat rentan terhadap pengaruh narkoba. Narkoba telah merusak kehidupan belajar dan memutus hubungan pelajar/mahasiswa dengan sekitarnya. Data berikut menunjukkan hal tersebut.

3. Target Capaian Kondisi UKS SMA pada Kurun Waktu 2021-2024

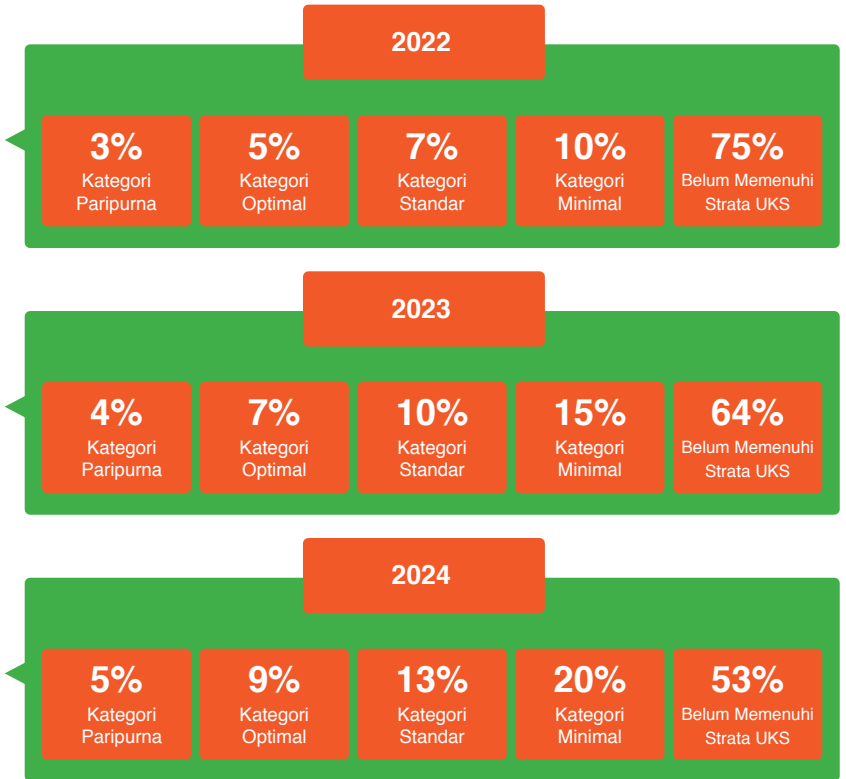
Berdasarkan hasil analisis kondisi UKS SMA saat ini dan kondisi UKS SMA yang diharapkan pada tahun 2024, berbagai pertimbangan terkait dengan sumberdaya yang ada baik di pusat maupun di daerah, dan permasalahan berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, maka target pencapaiannya disusun dalam bentuk Peta Jalan UKS SMA 2021-2024 seperti disajikan pada Gambar 6. Target utama yang

ingin dicapai adalah stratifikasi UKS SMA kategori paripurna, karena jika kategori tersebut dapat dicapai UKS SMA, maka sudah dapat dipastikan semua program Trias UKS dapat berjalan dengan baik dengan manajemen yang baik pula.


Penetapan target capaian UKS SMA kurun waktu 2021-2024 ditetapkan berdasarkan:

- 1. Indikator Kinerja Program (IKP) dengan rumusan "satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter".
- 2. Hasil survei stratifikasi UKS yang dilakukan Direktorat SMA Tahun 2021.

Peta Jalan UKS SMA 2021-2024



Gambar 9. Peta Jalan UKS SMA 2021-2024



Program dan kegiatan pembinaan UKS SMA sebagaimana diuraikan di atas dirancang sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun ke depan, yaitu 2021-2024. Upaya mencapai tujuan tersebut akan terasa berat apabila pihak-pihak yang berkepentingan bekerja secara parsial, sebaliknya akan terasa ringan apabila dilaksanakan secara bersama dan terintegrasi. Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila Tim UKS yang mencakup Tim Pembina UKS Pusat, Tim Pembina UKS Provinsi, Tim Pembina UKS Kabupaten/ Kota, Tim Pembina UKS Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS serta semua pihak yang berkepentingan sesuai kewenangannya, bergerak serentak untuk mewujudkan program TRIAS UKS melalui tindakan nyata. Untuk itu, mari kita satukan semua sumberdaya dan lakukan tindakan secara terpadu untuk mewujudkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter melalui program UKS.



**C. STRATEGI
IMPLEMENTASI UKS
SMA**



C. STRATEGI IMPLEMENTASI UKS SMA

Strategi yang digunakan untuk mendorong dicapainya target capaian yang ditetapkan dalam Peta Jalan UKS SMA 2021-2024 untuk mewujudkan paradigma baru UKS adalah:

1. Mengintegrasikan Nilai-nilai Karakter dalam UKS SMA

Rancangan program UKS harus memuat nilai-nilai karakter sebagaimana tertuang dalam konsep pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Nilai-nilai karakter tersebut diintegrasikan kedalam keseluruhan program UKS. Internalisasi nilai-nilai karakter menjadi bagian dari indikator keberhasilan pelaksanaan program UKS.

2. Menjadikan UKS sebagai Prioritas di SMA

Fokus kepala sekolah dan warga sekolah senantiasa mengalami pasang surut berkenaan dengan fokusnya terhadap UKS. Ketika kampanye UKS mereda, perhatian sekolah cenderung meredup, abai, dan kurang peduli terhadap UKS. Sebaliknya, ketika kampanye tentang UKS dilakukan secara gencar apalagi ditambah dengan adanya bantuan pemerintah, aktivitas UKS di sekolah kembali menggeliat. Kejadian seperti itu tentu saja menunjukkan budaya yang tidak baik dan tidak boleh berkembang di SMA. Kepala sekolah harus menjadikan UKS sebagai bagian program prioritas di sekolah yang dipimpinnya. Trias UKS harus mewarnai keseluruhan penyelenggaraan Pendidikan di SMA melalui integrasi program UKS ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk mewujudkan UKS sebagai prioritas di SMA maka UKS SMA yang sehat dan berkarakter harus menjadi sebuah “**Gerakan**”.

3. Membangun Sinergi Sumberdaya

Pembangunan pendidikan termasuk pengembangan program UKS bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/Kota), dan masyarakat untuk berbagi sumberdaya dalam mengembangkan UKS SMA akan terasa ringan apabila dilaksanakan secara gotong royong. Kendala terkait dengan anggaran

untuk membangun infrastruktur pendukung UKS akan menjadi mudah diatasi apabila sinergi terbangun. Kendala terkait dengan kebijakan otonomi daerah juga akan teratasi apabila semangat bersinergi terbangun. Sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri, mitra pembangunan dan Masyarakat secara umum perlu dibangun sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana UKS diantaranya:

- a. Pengadaan ruang UKS SMA dengan kelengkapan sarannya, sehingga pada gilirannya semua SMA di tiap provinsi memiliki ruang UKS,
- b. Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kesehatan di SMA mencakup: drainase, kantin sehat, tempat cuci tangan, dan jamban yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan sesuai standar.

4. Advokasi UKS yang Komprehensif dan Berkelanjutan

SDM merupakan komponen yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi program UKS di sekolah. SDM yang dimaksud bukan hanya pihak yang terlibat langsung sebagai Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS di sekolah, melainkan seluruh pemangku kepentingan yang turut berperan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS harus secara berkelanjutan ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu mengembangkan program-program UKS yang inovatif. Para pemangku kepentingan seperti pimpinan daerah, anggota DPRD komisi bidang pendidikan, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dan organisasi masyarakat pegiat pendidikan harus secara berkelanjutan diadvokasi melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat memberi pemahaman tentang pentingnya UKS sekaligus media untuk berdiskusi.

5. Membangun Kapasitas SDM UKS SMA

Membangun kapasitas SDM UKS SMA Tingkat Pusat dan Provinsi serta Tim UKS SMA, sehingga semua program Trias UKS dapat terimplementasikan dengan manajemen yang baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tim UKS SMA mencakup:

- a. Tim Pembina UKS Pusat
- b. Tim Pembina UKS Provinsi
- c. Tim Pembina UKS Kabupaten/ Kota
- d. Tim Pembina UKS Kecamatan
- e. Tim Pelaksana UKS

Sebagai upaya peningkatan SDM UKS SMA, selain Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS diperlukan juga Tim Fasilitator UKS di tiap kabupaten/ kota yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

6. Meningkatkan Intensitas Komunikasi melalui Komunitas UKS

Komunitas UKS merupakan wadah komunikasi tim pembina, fasilitator, pelaksana UKS, peserta didik, orang tua dan masyarakat peduli UKS. Komunitas ini diharapkan dapat menciptakan budaya komunikasi yang intens dan baik berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan program Trias UKS. Kehadiran komunitas UKS diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program UKS serta saling bertukar pengalaman baik antarsekolah. Pembina dan fasilitator UKS juga dapat memanfaatkan komunitas ini dalam melaksanakan tugas pembinaannya. Orang tua dan masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif menyampaikan gagasan untuk perbaikan UKS melalui komunitas ini.

Keberhasilan implementasi Trias UKS tidak hanya ditentukan oleh dukungan SDM yang ada di sekolah, melainkan juga perlu dukungan dari pihak orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah. Keterbukaan dan kemudahan akses komunikasi orang tua dan masyarakat terhadap sekolah akan sangat membantu pihak sekolah dalam mendeteksi berbagai masalah (kesehatan, keamanan dan keselamatan, dan perilaku menyimpang) yang dihadapi peserta didik baik di rumah atau di lingkungan masyarakat terutama lingkungan sekitar sekolah. Dengan demikian, pihak sekolah dalam hal ini pelaksana UKS dapat cepat bertindak untuk membantu dan mengatasinya.

Komunitas ini juga diharapkan menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi sehingga setiap peserta didik merasa terhubung dengan teman sebayanya, diperhatikan oleh orang dewasa di sekolah, dan dihargai sebagai anggota integral dari komunitas sangat membantu dalam menyukseskan program UKS.

7. Merancang Platform UKS SMA

Aplikasi UKS SMA merupakan media pengembangan program UKS yang dapat digunakan oleh pihak sekolah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah untuk:

- a. Mengetahui secara akurat level stratifikasi UKS dan indikator-indikator yang masih belum dicapai sehingga perlu ditingkatkan;
- b. Berbagi pengalaman terbaik dalam penyelenggaraan program UKS antara satu sekolah dengan sekolah lainnya;
- c. Menyediakan sumber referensi tentang UKS bagi sekolah dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Media sosialisasi tentang pengembangan program UKS kepada seluruh pemangku kepentingan;
- e. Media komunikasi pelaksana UKS, tim pembina UKS, siswa dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. Pemutakhiran data secara berkala tentang kondisi UKS SMA tiap sekolah di seluruh Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembinaan UKS baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah;
- g. Fitur-fitur lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UKS di masa yang akan datang.


8. Prioritas Pembinaan UKS SMA di Wilayah 3T

Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) merupakan daerah yang masih sangat membutuhkan bantuan dalam berbagai sektor termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan. Daerah 3T yang dimaksud berdasarkan surat nomor: 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), wilayah 3T meliputi 26 provinsi, 142 kabupaten/kota, jumlah sekolah sebanyak 3016 SMA.

Program-program UKS SMA di daerah 3T perlu dirancang dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik di masing-masing wilayah.

9. Prioritas Program Mitigasi Bencana untuk Sekolah di Wilayah Rawan Bencana Alam

Untuk SMA yang berada di wilayah rawan bencana alam, UKS harus menjadi wahana untuk berupaya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan seluruh



warga sekolah terhadap bencana di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa sekolah merupakan salah satu lokasi yang paling berisiko karena siswa, guru, dan lainnya berada terkonsentrasi dalam satu area. Sekolah yang berada di daerah rawan bencana perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sehingga dapat dijadikan bagian program UKS baik mitigasi sebelum bencana, saat terjadinya bencana, maupun pasca bencana. Dengan demikian, warga sekolah di daerah bencana juga dapat menikmati kondisi sekolah yang sehat, aman dan menyenangkan.



**D. RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN
TAHUN 2021-2024**

D. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021-2024

Rencana program dan kegiatan UKS SMA tahun 2021-2024 dirancang untuk mencapai tujuan:

1. Meningkatkan tata kelola UKS SMA;
2. Meningkatkan kualitas dan implementasi program UKS SMA;
3. Meningkatkan integrasi Trias UKS dalam keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di SMA ;
4. Meningkatkan peran warga sekolah khususnya peserta didik sebagai agen perubahan dalam implementasi UKS;
5. Meningkatkan stratifikasi UKS SMA dengan target pada tahun 2024, persentase sekolah yang memiliki strata paripurna 5%, optimal 9%, standar 13%, minimal 20% dan yang belum memenuhi strata UKS 53%.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirancang program dan kegiatan pembinaan UKS SMA sebagai berikut:

1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) UKS

NSPK UKS adalah rumusan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh semua pihak berkepentingan agar pelaksanaan program UKS menjadi lebih terarah, terpadu, efektif, dan efisien.

2. Bimbingan Teknis

Keberhasilan dalam pelaksanaan program-program UKS yang sudah dirancang ditentukan oleh pemahaman dari semua pihak yang terlibat tentang program-program yang akan dilaksanakan baik secara konseptual maupun operasional. Untuk itu, perlu dilakukan bimbingan teknis sehingga mereka siap melaksanakannya dengan baik.

3. Duta UKS SMA

Duta UKS SMA adalah siswa yang memiliki kapasitas memadai yang ditugaskan secara khusus oleh sekolah untuk mewakili sekolahnya dalam mempromosikan program-program UKS di lingkungan sekolahnya dan sekolah-sekolah lain. Duta UKS satu sekolah dapat bersinergi dan

membentuk komunitas dengan Duta UKS dari sekolah lain, bekerja sama, dan berkolaborasi sehingga upaya rebranding UKS menjadi lebih berdaya.

4. UKS SMA *Expo Blended*

Keberhasilan UKS SMA sebagai fondasi keseluruhan penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas akan terwujud dengan baik apabila mendapat dukungan dan apresiasi dari banyak pihak terutama pengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Dukungan dan apresiasi tersebut akan diberikan apabila mereka mengenal dan memahami dengan baik peran UKS dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. UKS SMA *Expo* merupakan salah satu upaya yang ditengarai dapat mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. UKS SMA *Expo* dapat dilakukan secara *blended* (daring & luring).

5. Bantuan Pemerintah

Pelaksanaan program UKS akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana baik fisik maupun non-fisik dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, agar semua program yang dirancang oleh Tim Pelaksana UKS di tiap sekolah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

6. Apresiasi UKS SMA

Apresiasi UKS SMA bertujuan untuk memberikan penghargaan atas capaian prestasi dalam mengembangkan UKS SMA. Apresiasi UKS SMA diberikan kepada:

- a. SMA yang telah mencapai strata paripurna;
- b. Kepala Daerah (Gubernur) yang menunjukkan kepedulian terhadap UKS SMA.

7. Supervisi

Supervisi dalam konteks UKS adalah proses pembinaan untuk memberikan bimbingan, arahan, dan tuntutan ke arah perbaikan dalam meningkatkan mutu dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian UKS. Supervisi UKS dilakukan oleh petugas ditunjuk dan diberi tugas melaksanakan supervisi baik pada tingkat sekolah, provinsi, maupun pusat.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai upaya untuk mengumpulkan data berkaitan dengan pelaksanaan program UKS dan hasil yang dicapainya sebagai dasar dalam melakukan refleksi dan perbaikan program UKS di tiap sekolah.

9. Dokumentasi Praktik Baik Pelaksanaan UKS

Sebagai upaya untuk saling berbagi dan membelajarkan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, maka praktik baik penyelenggaraan UKS dan pengembangan Pendidikan karakter melalui program UKS perlu didokumentasikan dengan baik. Dokumen praktik baik pendidikan karakter UKS merupakan asset yang sangat berharga dalam upaya pembinaan dan peningkatan pelaksanaan program UKS secara berkelanjutan.

10. Pengembangan Aplikasi UKS SMA

Pengembangan program UKS membutuhkan media berupa aplikasi UKS SMA agar lebih efektif dan terarah. Sampai saat ini belum ada aplikasi yang dapat membantu sekolah dalam pengembangan program UKS dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam berkontribusi terhadap pengembangan UKS. Dengan demikian, pengembangan aplikasi UKS SMA merupakan kebutuhan yang sangat mendesak yang perlu segera diwujudkan.

Program UKS tahun 2021-2024



Gambar 9. Program UKS tahun 2021-2024



E. LAMPIRAN

E. LAMPIRAN

Lampiran 1: Stratifikasi UKS/M untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK

No.	Indikator	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
1	Pendidikan Kesehatan	1. Adanya rencana pembelajaran tentang Pendidikan kesehatan	1. Di penuhiya strata minimal	1. Di penuhiya strata standar	1. Di penuhiya strata optimal
		2. Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler	2. Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler	2. Sekolah/madrasah melakukan peragangan di antara jam pelajaran	2. Penerapan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat
		3. Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikuler	3. Sekolah/madrasah melaksanakan literasi dengan materi kesehatan	3. Sekolah/madrasah melakukan tes kebugaran	3. Adanya forum komunikasi pendidik dan konselor sebaya
			4. Sekolah/madrasah melaksanakan pembinaan kader kesehatan	4. Pendidikan kesehatan (kespro, napza, sanitasi, gizi) terintegrasi dengan mata pelajaran lain	4. Melibatkan orang tua dalam pendidikan kesehatan
			5. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan CTPS bersama		
			6. Sekolah melaksanakan sarapan bersama dengan gizi seimbang		
			7. Sekolah melaksanakan kegiatan sikat gigi bersama		
2	Pelayanan Kesehatan	Sekolah/madrasah memfasilitasi Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala	1. Dipenuhiya standar minimal	1. Dipenuhiya strata standar	1. Dipenuhiya strata optimal
			2. Sekolah/madrasah melaksanakan pelayanan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan P3P (Pertolongan Pertama Pada Penyakit)		


No.	Indikator	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
			3. Sekolah/madrasah melibatkan Puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan		
			4. Sekolah/madrasah membantu pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri		
3	Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	1. Sekolah/madrasah dengan sumber air layak, tersedia di lingkungan sekolah dan cukup	1. Di penuhiya strata minimal	1. Di penuhiya strata standar	1. Di penuhiya strata optimal
		2. Sekolah/madrasah dengan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir	2. Sekolah/madrasah memiliki rasio toilet sesuai dengan standar Permendikbud 24/2007	2. Sekolah/madrasah memanfaatkan pekarangan sekolah/ madrasah dengan menanam tanaman obat dan pangan	2. Air minum disediakan oleh sekolah/madrasah
		3. Sekolah/madrasah memiliki toilet dengan kondisi baik dan terpisah	3. Sekolah/madrasah memiliki tempat sampah yang terpilah	3. Sekolah/madrasah melakukan 3R (Reduce, Resuse, Recycle)	3. Sekolah/madrasah memiliki rasio toilet sesuai dengan standar Kepmenkes 1429/2006
		4. Sekolah/madrasah memiliki saluran drainase	4. Sekolah/madrasah memiliki kantin sehat	4. Tersedia Table_1 MKM (Manajemen Kebersihan Menstruasi)	4. Kantin telah mendapatkan sticker tanda laik higiene sanitasi
		5. Sekolah/madrasah memiliki kantin	5. Sekolah/madrasah menerapkan KTR		5. Tersedia toilet disabilitas
		6. Sekolah/madrasah memiliki lahan/ruang terbuka hijau			6. Sekolah/madrasah bekerja sama dengan Puskesmas melakukan pemeriksaan kualitas udara dan skrining siswa perokok
		7. Sekolah/madrasah memiliki tempat sampah yang tertutup			7. Sekolah/madrasah bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bank sampah
		8. Sekolah/madrasah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup			8. Sekolah/madrasah melakukan kegiatan pengolahan tanaman obat dan pangan
		9. Ruang Kelas dalam keadaan bersih			

No.	Indikator	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
		10. Sekolah/madrasah melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk			
		11. Sekolah/madrasah memiliki aturan KTR, KTN, KTK, KTP			
4	Manjemen UKS	1. Buku pegangan kesehatan (Buku UKS/M, gizi seimbang, kespro, sanitasi, Napza, dll)	1. Di penuhiya strata minimal	1. Di penuhiya strata standar	1. Di penuhiya strata optimal
		2. Ada penanggungjawaban UKS	2. Sekolah/madrasah menggunakan buku rapor kesehatanku	2. Adanya kemitraan dengan instansi terkait	2. Sekolah/madrasah melakukan pembinaan dan pengawasan
		3. Tersedia media KIE kesehatan (Alat peraga, poster, dll)	3. Sekolah/madrasah melakukan konsultasi/koordinasi dengan Tim Pembina UKS/M	3. Tersedia sarana dan prasarana sekolah/madrasah aman bencana	3. Seluruh guru terorientasi UKS/M
		4. Tersedia sarana prasarana olahraga	4. Sekolah/madrasah memiliki ruangan UKS		4. Sekolah menggunakan Rapor Kesehatan Lingkungan dna Kantin
		5. Tersedia dana untuk kegiatan UKS/M dan pemeliharaan sanitasi sekolah/madrasah			
		6. Terdapat kemitraan dengan Puskesmas			
		7. Terdapat perencanaan kegiatan UKS di Sekolah/madrasah			

Tabel 2. Lampiran 1: Stratifikasi UKS/M untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK

Cara Perhitungan Stratifikasi UKS/M

Sekolah/madrasah harus memenuhi seluruh indikator (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS/M) pada kelompok stratifikasi UKS/M tertentu (minimal atau standar atau optimal atau paripurna)

- 
- **Sekolah memiliki stratifikasi UKS/M Minimal** apabila telah memenuhi **seluruh indikator** (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS/M) pada kelompok stratifikasi **UKS/M minimal**
 - **Sekolah memiliki stratifikasi UKS/M Standar** apabila telah memenuhi **seluruh indikator** (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS/M) pada kelompok stratifikasi **UKS/M standar**
 - **Sekolah memiliki stratifikasi UKS/M Optimal** apabila telah memenuhi **seluruh indikator** (pendidikan kesehatan, Pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS/M) pada kelompok stratifikasi **UKS/M optimal**
 - **Sekolah memiliki stratifikasi UKS/M Paripurna** apabila telah memenuhi **seluruh indikator** (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS/M) pada kelompok stratifikasi **UKS/M Paripurna**

Lampiran 2: Hasil Survei Stratifikasi UKS SMA Tahun 2021

Latar Belakang

Pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Agama; dan Kementerian Dalam Negeri membuat Peraturan Bersama tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS. Didalamnya terdapat tiga pilar UKS yang disebut dengan Trias UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang harus didukung oleh manajemen/ tata kelola UKS yang baik. Kesuksesan pelaksanaan UKS juga tidak lepas dari peran Tri Pusat Pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Saat ini, UKS memerlukan terobosan untuk mempercepat pengembangannya melalui pengukuran pelaksanaan Trias UKS dan manajemen UKS di sekolah berdasarkan stratifikasi UKS. Stratifikasi UKS terdiri dari strata minimal, standar, optimal dan paripurna yang digunakan untuk memetakan kondisi UKS di seluruh Indonesia dalam pengambilan kebijakan, pembinaan, sekaligus memudahkan sekolah untuk mengimplementasikan UKS yang baik. Hasil dari stratifikasi UKS dapat digunakan oleh Tim Pelaksana UKS SMA untuk perencanaan kegiatan UKS dan melengkapi sub-indikator guna mencapai stratifikasi paripurna. Sedangkan bagi Tim Pembina UKS Provinsi dan Kabupaten/Kota, hasil stratifikasi dapat digunakan sebagai sinergi program dan kegiatan antar K/L atau OPD terhadap output yang akan dicapai bersama.

Tujuan

1. Menentukan gambaran awal status kesehatan sekolah di jenjang SMA
2. Menyusun rekomendasi kegiatan prioritas UKS di jenjang SMA
3. Menyusun rekomendasi pemanfaatan instrumen stratifikasi UKS di jenjang SMA

Waktu

Instrumen stratifikasi UKS diisi secara online sepanjang bulan Juli – September 2021.

Sasaran

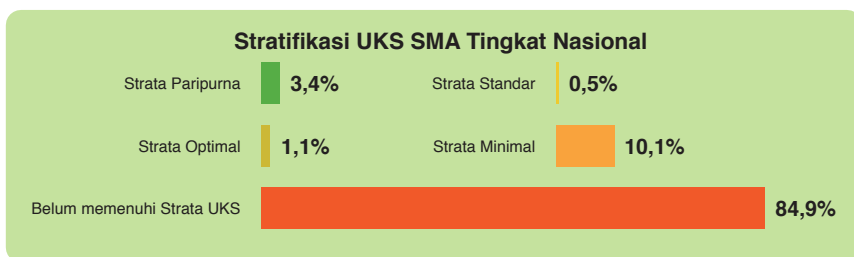
23,45% SMA di Indonesia (total jumlah SMA di Indonesia adalah 14.082) telah mengisi self assessment stratifikasi UKS SMA yang memiliki 182 pertanyaan. Sasaran berasal dari 3302 sekolah di 34 provinsi dan 340 Kota/ Kabupaten.

Metodologi

Instrumen stratifikasi UKS jenjang SMA di adopsi ke dalam Kemendikbudriste Form dengan memasukan seluruh indikator dan penjelasan komponen pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen UKS. Pengumpulan data ditindaklanjuti dengan analisa dan validasi data.

Hasil

Dari 3302 sekolah yang telah mengisi stratifikasi UKS, ada 10,1% sekolah yang memenuhi strata minimal, 0,6% memenuhi strata standar, 1,1% memenuhi strata optimal dan 3,4% memenuhi strata paripurna secara lengkap di setiap indikator Trias UKS dan manajemen UKS. Sedangkan 84,9% sekolah belum memenuhi indikator-indikator UKS secara lengkap. Angka ini menjelaskan kemampuan sekolah untuk memenuhi indikator-indikator di setiap komponen berbeda-beda. Semakin banyak indikator, semakin besar tantangan sekolah untuk dapat memenuhi secara lengkap. Sekolah yang belum memenuhi sub dinikator secara lengkap dapat didorong untuk masuk ke dalam stratifikasi. 98% sekolah menyatakan bahwa stratifikasi UKS bermanfaat karena dapat mengetahui status UKS dan mengukur keberhasilannya serta dapat memenuhi kebutuhan warga sekolah.



Gambar 10. Stratifikasi UKS SMA Tingkat Nasional

Untuk SMA yang sudah memenuhi strata secara lengkap, rata-rata sub indikator pendidikan kesehatan sudah dipenuhi oleh sekolah, terutama rencana pendidikan kesehatan, pendidikan kesehatan dan jasmani dilaksanakan secara kurikuler dan pelaksanaan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat. Sub indikator yang perlu diprioritaskan adalah sarapan bersama dengan makanan bergizi seimbang sebagai rangkaian kegiatan pendidikan gizi bersamaan dengan minum tablet tambah darah. Sub indikator lain yang masih perlu ditingkatkan adalah literasi kesehatan

dan pembinaan kader kesehatan. Sikat gigi bersama akan direkomendasikan untuk direviu pelaksanaannya di jenjang SMA.

Pada indikator pelayanan kesehatan, sub indikator yang paling banyak dipenuhi adalah sekolah yang minimal 60% peserta didiknya memiliki status gizi baik (Indeks Massa Tubuh) dan sekolah yang melibatkan Puskesmas dalam penanganan rujukan. Sedangkan sub indikator yang perlu diprioritaskan adalah konseling dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.

Pada indikator pembinaan lingkungan sekolah sehat, sub indikator yang paling banyak dipenuhi adalah sekolah memiliki ruang terbuka hijau dan memiliki aturan kawasan tanpa rokok, napza, kekerasan dan pornografi. Sedangkan sub indikator yang perlu diprioritaskan adalah tersedianya toilet disabilitas dan toilet ramah Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM). Sedangkan sub indikator yang perlu diprioritaskan adalah tersedianya toilet disabilitas dan toilet ramah Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM), pemberantasan sarang nyamuk, kantin yang mendapatkan stiker hygiene sanitasi dan pengelolaan toga.

Pada indikator manajemen UKS SMA, sub indikator yang paling banyak dipenuhi adalah tersedianya sarana prasarana olahraga dan penanggungjawab UKS. Sedangkan sub indikator yang perlu diprioritaskan adalah penggunaan buku rapor kesehatan lingkungan dan buku rapor kesehatanku, media komunikasi informasi edukasi kesehatan di sekolah.

Rekomendasi

1. Tim pembina UKS tingkat Pusat/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten/ Kecamatan melakukan sosialisasi stratifikasi UKS dan mendorong seluruh sekolah dapat melakukan *self assessment* stratifikasi UKS.
2. Melakukan validasi hasil asesmen stratifikasi UKS bersama dengan Tim Pelaksana dan Tim Pembina UKS tingkat Kecamatan.
3. Melakukan penguatan koordinasi antara puskesmas dengan pihak sekolah untuk memenuhi indikator pelayanan kesehatan.
4. Melakukan penguatan koordinasi antara BPOM dengan pihak sekolah untuk memenuhi sub indikator terkait kantin sehat.
5. Mengembangkan Sistem Informasi UKS secara komprehensif.
6. Mereviu sub indikator stratifikasi UKS agar tahapan ketercapaian indikator lebih mudah diimplementasikan oleh sekolah.



F. DAFTAR PUSTAKA

F. DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbud, 2019. *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS/M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemendikbud, 2021. *Laporan Stratifikasi UKS SMA*. Jakarta: Direktorat SMA.

Kemendikbud, 2021. *Pengelolaan UKS di SMA*. Jakarta: Direktorat SMA.

Kemenkes, 2020. *Petunjuk Teknis Pembinaan Sekolah/Madrasah Sehat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah, 2020. *No. 18 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.

Peraturan Presiden, 2017. *No. 87 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011. *No. 2269/Menkes/PER/XI/2011 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menyatakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*.

Peraturan Bersama: *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, 2014. Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M)*.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020. *No. 22 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024*.

PETA JALAN UKS SMA

TAHUN 2021 – 2024

Kegiatan UKS terkait erat dengan pengembangan pendidikan karakter di satuan pendidikan. UKS harus dipahami dalam kaitannya dengan pembentukan manusia pancasilais seperti tercermin dalam Profil “Pelajar Pancasila”. Dimensi nilai dalam pengembangan UKS merupakan bagian penting dalam dimensi profil “Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia”.

Manusia pada dimensi ini memiliki ciri menghargai tubuh sebagai anugerah Tuhan, mengembangkan dimensi fisik sebagai bagian dalam mengembangkan kehidupan rohani, dan spiritual yang memungkinkan individu menjalankan tanggungjawab moralnya, yaitu menjaga, menghargai, dan melakukan kebaikan, bagi diri sendiri dan orang lain.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS



ISBN 978-602-5616-47-1 (PDF)



9

786025

616471